

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Kupang

Kota kupang yang memiliki luas wilayah 108,27 Km² terdiri dari 6 kecamatan dan 51 kelurahan, kelurahan tersebut terbagi lagi menjadi 424RW/RK dan 1.315 TR. Secara astronomis, kota kupang terletak antara: 10° 36' 14" – 10° 39' 58" Lintang Selatan, 123° 32' 23" – 123° 37' 01" Bujur Timur. Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kota Kupang adalah:

Timur : Kecamatan Kupang Tengah dan Tabenu Kabupaten Kupang

Barat : Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau

Utara : Teluk Kupang

Selatan : Kecamatan Kupang Barat dan Nekamese

Tabel 4.1
Luas wilayah Menurut Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (km ²)
1	Alak	86,91
2	Maulafa	54,80
3	Oebobo	14,22
4	Kota Raja	6,10
5	Kelapa Lima	15,02
6	Kota Lama	3,22
Kota Kupang		180,27

Sumber : Kantor Pertahanan Kota Kupang tahun 2017

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alak dengan luas 86,91 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 3,22 km². Kota Kupang dipimpin oleh

seorang Walikota dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Walikota dibantu oleh seorang wakil walikota yang dipilih melalui suatu pemilihan umum pada setiap tahun. Adapun jumlah penduduk Kota Kupang dari tahun 2016- 2017.

Table 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2016-2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	
		2016	2017
1	Alak	62.090	63.389
2	Maulafa	75.459	79.581
3	Oebobo	97.696	100.149
4	Kota Raja	53.953	54.794
5	Kelapa Lima	78.850	80.260
6	Kota Lama	78.850	34.535
Kota Kupang		402.286	412.708

Sumber :Proyeksi Penduduk Kota Kupang 2017

Pada table diatas dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk Kota Kupang dari keenam Kecamatan dari tahun 2016-2017 mengalami peningkatan. Namun Kecamatan Kota Lama mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk 78.850 juta jiwa. Jumlah penduduk Kota Kupang yang paling banyak dari tahun 2016-2017 adalah penduduk di kecamatan Oebobo. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit pada tahun 2016 terdapat di Kecamatan Kota Raja sedangkan pada tahun 2017 terdapat di Kecamatan Kelapa Lima

4.2 Profil Tempat Penelitian

Penelitian ini di dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti dengan menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU 16 Tahun 1997 antara lain:

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya serta mandiri atau bersama dengan BPS.
2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

4.3 Sejarah Berdirinya Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Masa Hindia Belanda

Didirikan tahun 1920 dengan tugas mengumpulkan data statistik Bea dan Cukai, dan bernaung di bawah Departemen *Lanbout Nijverheid en Handel*. Tanggal 24 September 1924 pusat kegiatan pindah dari Bogor ke Jakarta dengan nama *Centraal Kantoor Voord de Statistiek (CKS)*.

2. Masa Pemerintahan Jepang

Tahun 1942-1945, CKS beralih ke Pemerintahan Militer Jepang kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan Pemerintahan

militer Jepang. Bernaung di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu) dengan nama “CHOSASITU GUNSEIKANBU”

3. Masa Pemerintahan RI 1945-1965

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 Choisasitsu Guenseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkat Umum (KAPPURI), yang dipimpin oleh Mr. Abdul Karim Pringgodigdo. Pada awal 1946 KAPPURI pindah ke Yogyakarta mengikuti pindahnya Pusat Pemerintahan RI ke Yogyakarta. Saat itu KAPPURI dipimpin oleh SEMAUN. Sementara itu di Jakarta Pemerintah Federal (BELANDA) menghidupkan CKS. Berdasarkan surat edaran Kementerian Kemakmuran 12 Juni 1950 No.219/SC, kedua kantor tersebut dilebur menjadi satu dengan nama “Kantor Pusat Statistik” dibawah Kementerian Kemakmuran.

Berdasarkan surat keputusan Presiden RI No 172/195, KPS diubah menjadi “Biro Pusat Statistik” (BPS), dan langsung berada di bawah Perdana Menteri. Pada tanggal 24 September 1960 dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1960 tentang Sensus dan Statistik tanggal 26 September 1960 dengan Undang-Undang No.7 1960 ditetapkan bahwa “Badan Pusat Statistik” (BPS), ditugas sebagai penyelenggara Sensus (Pasal 2 UU No.7 tahun 1960).

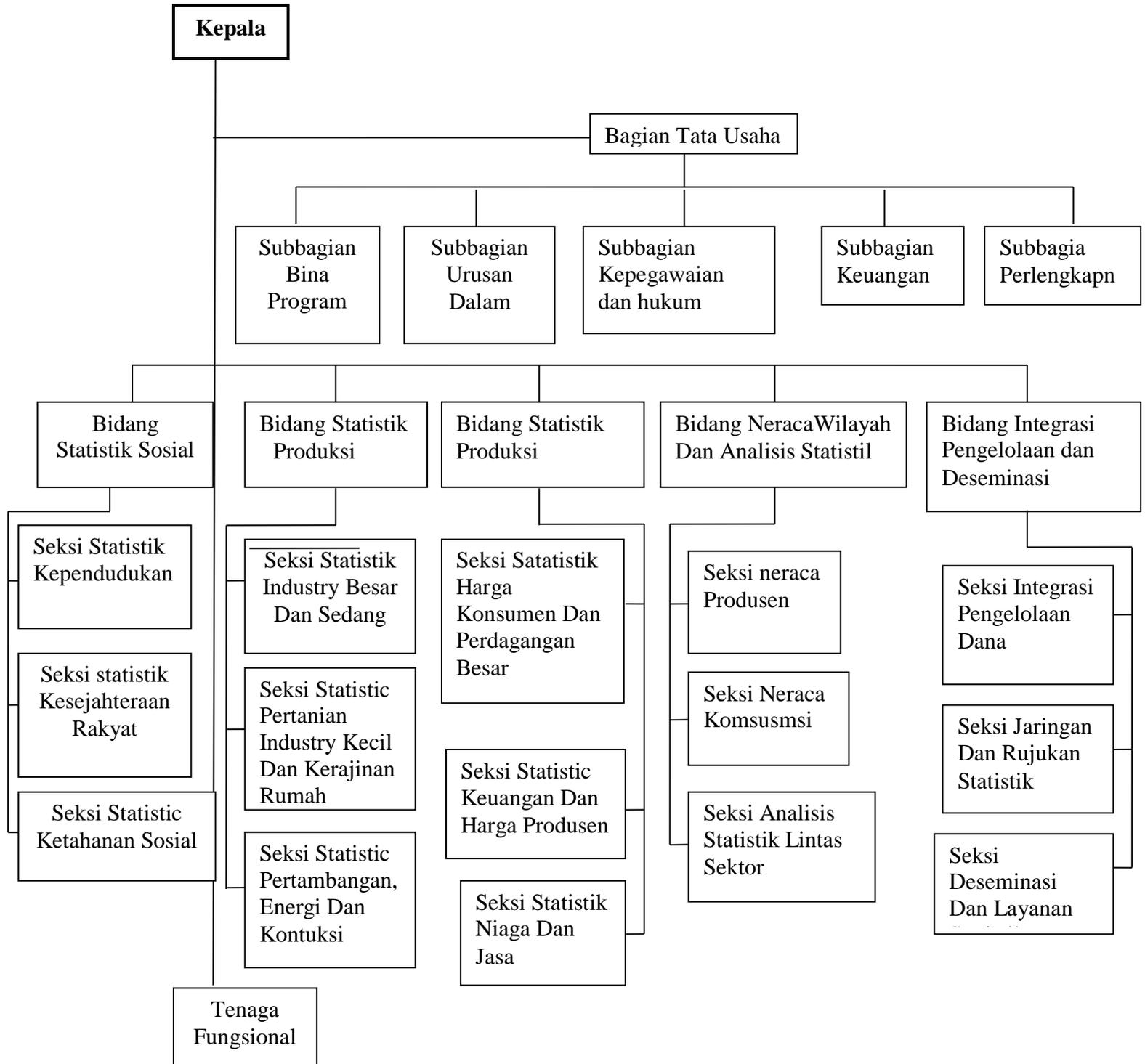
Tahun 1961, untuk yang pertama kalinya BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk sejak masa kemerdekaan RI. Di tiap-tiap kantor Gubernur (Propinsi), Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan Sensus Penduduk. Tahun 1965, dengan Keputusan Predisium Kabinet No.Aa/C/9

Bagian Sensus di tiap kantor Gubernur dan Kabupaten/Kotamadya tersebut ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik.

4. Masa Pemerintahan RI 1966-Sekarang

Tahun 1968, ditetapkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1968,yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja BPS (di Pusat dan Daerah). Tahun 1980 ditetapkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1980, tentang organisasi BPS sebagai pengganti PP No.16/1968. Berdasarkan PP No.6/1980 di setiap provinsi terhadap kantor statistik dengan nama Kantor Statistik Provinsi dan begitu juga setiap Kabupaten dan Kotamadya terhadap Kantor Statistik dengan nama Kantor Statistik Kabupaten/Kotamadya.

4.4 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur



4.5 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4.5.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun Visi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Kupang ialah sebagai berikut : Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”.

Adapun Misi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Kupang :

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegrasi dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

4.5.2 Nilai- Nilai Inti Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nilai-nilai inti BPS terdiri dari :

- a. Profesional
 1. Komponen: Mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
 2. Efektif: Memberikan hasil maksimal.
 3. Efisien: Mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.
 4. Inovatif: Selalu melakukan pembaruan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus menerus.

5. Sistematis: Menyediakan bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu dengan yang lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.
- b. Integritas
1. Dedikasi: Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi.
 2. Disiplin: Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 3. Konsisten: Satunya kata dengan perbuatan
 4. Terbuka: Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak.
 5. Akuntabel: Bertanggung jawab dan setiap langkahnyaterukur.
- c. Amanah
1. Terpercaya: Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual.
 2. Jujur: Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpan dari prinsip moralitas.
 3. Tulus: Melaksanakan tugas konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.
 4. Adil: Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya

4.5.3 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan Pusat Statistik.

Adapun tugas dari Badan Pusat Statistik adalah untuk Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi BPS Provinsi NTT:

1. Pengajian, penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kegiatan statistik.
2. Pengkoordinasi kegiatan statistik nasional dan regional.
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar
4. Penetapan sistem statistik nasional
5. Pembinaan dan fasilitas terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik, dan
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang, perencanaan, umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Kewenangan BPS Provinsi NTT

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik,
- b. Penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

4.6 Kegiatan Badan Pusat Statistik

1. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketetapan data statistik yang dihasilkan. BPS merupakan instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak sekitar 1960. Sebelum menggunakan kalkulator dan alat hitung sipoa dalam mengolah data.

Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. Personal komputer yang secara umum lebih mudah dan telah dicoba digunakan untuk menggantikan mainframe. Sejak 1980an, personal komputer telah digunakan di seluruh kantor BPS Provinsi, diikuti dengan penggunaan komputer di seluruh BPS kabupaten dan kota sejak 1992.

Dengan menggunakan data personal komputer, kantor statistik di daerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukan data mentah ke dalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional.

Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang ditetapkan oleh direktorat teknis di BPS pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempublikasikan hasil yang diperoleh dari survei yang diselenggarakan.

Pengolahan data Sensus Penduduk tahun 2000 telah menggunakan mesin scanner, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Efektif positif dari penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain lebih cepat, juga dapat memotivasi pegawai yang terlibat turun bertanggung jawab untuk menghasilkan sebanyak mungkin data statistik dan indikator secara tepat waktu dan akurat dibanding sebelumnya. Selain itu, penggunaan komputer sangat mendukung BPS dalam menghasilkan berbagai data statistik dan indikator-indikator yang rumit seperti kemiskinan, Input-Output (I-O) table, Social Accounting Matrix (SAM), dan berbagai macam indeks komposit dalam waktu yang relatif singkat.

Pada 1993, BPS mulai mengembangkan sebuah sistem informasi statistik secara geografis khususnya untuk pengolahan data wilayah sampai unit administrasi yang terkecil yang telah mulai dibuat secara manual sejak 1970. Data wilayah ini dibuat khususnya untuk mengkaji karakteristik daerah yang menonjol yang diberikan oleh para perumus kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entri, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk

mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah.

Penggunaan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang diinginkan dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik, melakukan pembaharuan/inovasi dalam hal metode kerja yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik.

2. Analisis Data

Analisis terhadap data yang dihasilkan dari sensus dan survei BPS, dilaksanakan oleh Biro Analisis dan Pengembangan. Untuk menghasilkan analisis data yang optimal, BPS juga bekerjasama dengan para pakar dari perguruan tinggi di Indonesia dan badan-badan Internasional.

Kajian dan analisis data statistik diarahkan untuk dapat memahami dan memberikan perkiraan kuantitatif proyeksi berbagai bidang penting dari pembangunan nasional, untuk keperluan perencanaan, penyusunan kebijaksanaan dan pemantauan. Hasil-hasil analisis tersebut antara lain: Analisis Statistik Industri Besar/Sedang, Analisis Pertambangan dan Gas Bumi, Analisis Statistik Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, Analisis Usaha Perusahaan Perikanan Lautan dan Tambak, Analisis Kependudukan, Analisis Fertilitas dan sebagainya.

BPS telah menetapkan status desa miskin berdasarkan PRODES 1990. Dari variabel yang ada diambil beberapa yang berhubungan dengan kemiskinan. Ada tiga kelompok variabel yang digunakan, yaitu: potensi variabel fasilitas desa, fasilitas

perumahan dan lingkungan dan variabel keadaan penduduk. Setiap variabel ditentukan nilai skornya berdasarkan tiga kategori, kaya, sedang dan miskin. Kemudian dijumlahkan dan didapatkan total skor setiap desa. Total skor tersebut digunakan untuk menentukan status tiap desa.